

Pancasila dan Tantangan Masa Kini

Roberto Salu Situru

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Kristen Indonesia Toraja

robertosalusituru@gmail.com

085255543211

Abstrak

Tulisan ini membahas tentang tantangan yang dihadapi Ideologi Pancasila pada masa kini. Pancasila sendiri mendapat tantangan yang justru berasal dari dalam negeri sendiri dengan berbagai masalah seperti menguatnya isu pergantian dasar negara, marak berita hoax yang mengarah pada politik identitas yang mengancam disintegrasi bangsa. Hasil kajian dari tulisan ini bahwa pemerintah perlu melakukan antisipasi terhadap persoalan ini, dengan penanaman nilai luhur Pancasila dan melihat bahwa Pancasila merupakan ideologi terbuka dan ideologi pemersatu.

Kata kunci: Pancasila, agama, politik identitas, hoax

1. PENDAHULUAN

Pancasila ialah dasar negara sering juga disebut dengan dasar falsafah negara (*philosophische grondslag*). Dalam hal tersebut Pancasila dipergunakan sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan negara atau penyelenggaraan negara. Dalam perjalanan Pancasila mengalami perkembangan persepsi mulai masa Orde Baru hingga masa reformasi. Pada masa Orde Baru Pancasila dilaksanakan dengan konsisten dan terarah lewat penerapan P4, meskipun dalam implementasinya masih terdapat penyimpangan. Namun sejak masa reformasi pandangan terhadap Pancasila mulai memudar sebagai buktinya banyak siswa SD hingga perguruan tinggi tidak mengetahui sejarah dan makna dari nilai Pancasila serta adanya ormas anti Pancasila.

Seiring dengan berjalannya waktu Pancasila terus mendapat ancaman disintegrasi bangsa. Pancasila dibentuk berdasarkan kesepakatan bersama yang

memperhatikan keragaman suku, budaya maupun agama, artinya Pancasila adalah titik temu dari semua perbedaan yang ada di Indonesia. Namun hal ini kembali diuji dengan maraknya berbagai bentuk kekerasan yang terjadi atas nama agama yang menandakan kemunduran peradaban bangsa Indonesia. Tidak hanya itu, mudurnya nilai-nilai Pancasila juga tergambar dari hilangnya semangat saling menghargai dan semangat gotong-royong. Belum lagi, bahwa adanya organisasi yang jelas menolak keberadaan Pancasila dan ingin menggantikan dengan ideologi lain.

Persoalan tidak hanya muncul dari masyarakat Indonesia sendiri, namun juga dari gelombang globalisasi yang masuk bagaikan angin yang tidak terlihat namun dirasakan. Anak-anak mulai tumbuh dengan kemajuan dan akses teknologi tanpa kontrol, gaya hidup hedonisme, maraknya berita hoax, dan kenakalan lainnya. Pancasila sebagai *way of life* tidak lagi menjadi panutan meskipun negara Indonesia

sudah mewajibkan pendidikan Pancasila dipelajari dari tingkat SD hingga Perguruan Tinggi. Memudarnya implementasi nilai-nilai Pancasila dapat mengancam disintegrasi bangsa.

Dalam beberapa kasus di Indonesia telah terjadi peristiwa pemberontakan yang ingin memisahkan diri dari bangsa ini di antaranya Aceh dalam Peristiwa Gerakan Aceh Merdeka, Maluku (RMS) dan juga Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Papua. Peristiwa ini disebabkan oleh berbagai persoalan, salah satunya adalah persoalan implementasi keadilan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Persoalan ini tentu tidaklah mudah bagi pemerintah bahkan penyelesaian persoalan ini selalu dalam *on procces* artinya bahwa ancaman memisahkan diri atau mengubah dasar negara bukanlah sebuah jawaban yang dapat diterima. Maka dari itu perlunya peran pemerintah untuk tetap membakar semangat nasionalisme di tengah keraguan masyarakat terhadap Pancasila.

2. METODE

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah kajian literatur dengan merujuk pada beberapa kasus dan survey yang pernah dilakukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang merupakan penelitian yang bersifat kontekstual yang berusaha menekankan pada pemaknaan suatu fenomena interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu.

3. PEMBAHASAN

a. Pancasila dan Agama

Sejak dahulu negara ini sudah dibentuk dari perbedaan suku, ras, dan

agama, bahkan dalam sejarah Pancasila mencatat adanya perbedaan kelompok nasionalis islami dan nasional sekuler untuk menentukan arah pandangan negara Indonesia. Perdebatan ini kembali muncul pada saat awal reformasi tahun 1998-2002 dimana fraksi PPP dan PBB menginginkan negara Indonesia menjadi negara yang berdasarkan agama.¹ Meskipun demikian sampai saat ini Pancasila dan UUD 1945 tetap kokoh sebagai dasar negara Indonesia.

Saat ini isu pergantian dasar negara melalui parlemen tidak lagi didengar namun beberapa gejala tentang adanya keinginan kelompok masyarakat untuk mengubah dasar negara mulai muncul seperti misalnya adanya isu negara agama atau ormas yang tidak berdasarkan Pancasila.² Menurut Santoso mencatat bahwa pada umumnya ada tiga macam yang melatarbelakangi munculnya kelompok ini adalah: pertama, adanya ketidakpuasan akan kinerja pemerintah selama ini sehingga muncul ide untuk membuat ideologi atau visi dan misi yang berbeda dengan yang ada sebelumnya. Kedua ketidakpuasan terhadap kondisi ekonomi, politik, sehingga mereka ingin membuat suatu peraturan sendiri dan mengatur kehidupannya sendiri, ketiga, pemahaman terhadap keyakinan tertentu dan cenderung mengarah pada paham berbeda, bahkan separatis sehingga

¹ Valina Singka Subekti, *Menyusun Konstitusi Transisi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008)

² Ulya, *Pancasila Simbol Harmonisasi Antar Umat Beragama di Indonesia*, (Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan ISSN 2354-6147 eISSN 2476-9649, 2016) hal 64-74

merusak tatanan nilai dan moral yang ada serta menimbulkan disintegrasi.³

Mengganti atau mengubah dasar negara berlandaskan agama, tentu menghadirkan kekuatan umat beragama lainnya seperti Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Kong Hu Cu. Mereka berharap adanya jaminan perlindungan agar diperlakukan sama dan setara akan hak-haknya sebagai warga negara. Tidak heran jika kelompok minoritas menolak keberadaan negara berlandaskan agama karena merasa akan adanya dugaan perlakuan diskriminasi hak.

Dalam kondisi semacam ini, negara yang mengambil peranan penting dalam penegakan ideologi Pancasila. Namun tidak hanya itu, perbaikan di berbagai sektor harus dilaksanakan seperti pemerataan ekonomi dan pembangunan infrastruktur.

Pluralitas ini di satu pihak dapat merupakan potensi yang sangat besar dalam pembangunan bangsa, namun di lain pihak juga merupakan sumber potensial bagi munculnya berbagai konflik yang mengarah pada disintegrasi bangsa.⁴ Potensi disintegrasi bangsa yang terus mengancam sebenarnya telah terjawab pada nilai-nilai Pancasila yang memuat pandangan kompleksitas, heterogenitas atau pluralitas yang memang disadari sejak awal kemerdekaan maupun pasca kemerdekaan.

Pemasalahan yang muncul sebenarnya ada dua, pertama adanya keinginan untuk mengganti dasar negara karena ketidakpuasan terhadap produk hukum yang tidak menyelesaikan persoalan seperti korupsi, kolosi, dll. Kedua bahwa adanya anggapan bahwa negara memiliki mayoritas agama terbesar di dunia sehingga terlihat aneh ketika tidak berlandaskan agama. Persolan ini tidak akan muncul ketika memahami konsep tentang akar nasionalisme Indonesia yang sejak awal justru didasarkan pada tekad yang menekankan pada pentingnya cita-cita bersama. Kesadaran semacam itu jelas terlihat pada semboyan *Bhinneka Tunggal Ika* yang menekankan pada pentingnya cita-cita yang sama dan sekaligus kemajemukan sebagai perekat kebangsaan. Pada prinsipnya etika ini meneguhkan pentingnya komitmen negara untuk memberi ruang bagi kemajemukan pada satu pihak dan pada pihak lain tercapainya cita-cita kemakmuran dan keadilan sebagai wujud dari tujuan nasionalisme Indonesia.⁵

Pancasila tidak pernah menggeser keberadaan konsep mayoritas maupun minoritas, atau konsep perbedaan atau heterogenitas dan pluralisme tetapi hadir sebagai sebuah konsep ideologi yang dapat diterima dan untuk kepentingan bersama menuju Indonesia satu sebagaimana tujuan pada sila ketiga “Persatuan Indonesia”. Dalam implementasinya Indonesia telah memberikan hak-hak istimewa kepada

³ Santoso, A. L. *Sejarah Terlengkap Gerakan Separatis Islam*. (Yogyakarta: Palapa, 2014) hal. 294-295

⁴ Ristina, *Pancasila dan Berbagai Permasalahan Aktual* (Jawa Tengah, Seminar Nasional Hukum Volume 2 Nomor 1 Tahun 2016,) hal 599-610

⁵ Abd Mu'id Aris Shofa, *Memaknai Kembali Multikulturalisme Indonesia Dalam Bingkai Pancasila* (Malang, Jurnal Pancasila dan , Kewarganegaraan, Vol. 1, No. 1, Juli 2016 ISSN 2527-7057, 2016) hal 34-39

beberapa daerah seperti Aceh dan Yogyakarta serta otonomi daerah bagi kabupaten. Begitu pula dengan adanya pengakuat terhadap keanekaragaman suku, ras agama, golongan. Kedua bahwa Pancasila dalam sila kelima telah meletakkan salah satu tujuan terbentuknya negara Indonesia yakni hadir untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Artinya Pancasila menentang keras konsep ketidakadilan yang dirasakan masyarakat, tinggal peran pemerintah sebagai vasilitor dan eksekutor untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran tersebut.

b. Pancasila dan Politik (Berita Hoax dan Politik Identitas)

Tahun 2019 merupakan tahun politik, tahun dengan metode pemilihan serentak yakni pemilihan Presiden, calon DPD, DPR, DPRD Tk.1 dan DPRD Tk.2. Peristiwa ini tentu memakan tenaga, waktu dan pikiran, terlebih dengan banyaknya berita politik yang mengarah politik identitas yang dapat memecah bangsa. Hal yang serupa juga terjadi pada saat pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2017 dimana isu agama sangat kental mewarnai proses politik yang terjadi.⁶

Dalam pemilihan presiden 2019 diwarnai oleh dua kubu yakni Prabowo-Sandiaga Uno dan Joko Widodo-KH. Ma'Aruf Amin. Kedua kubu dalam media sosial (*Facebook*) dikenal *kampret* (pendukung Prabowo-Sandi) dan *cebong* (pendukung Joko Widodo-Amin). Dalam proses ini, media sosial menjadi ruang tanpa batas segala ejekan,

hinaan, *negatif campaigning*, *black campaign*, dikotomi kelompok, isu suku, ras, agama, dll menjadi perbincangan yang mengerikan. Ruang publik yang semakin luas dengan kemajuan teknologi membuat segala isu tidak lagi terkontrol hanya untuk mengait simpati masyarakat. Dan yang paling aneh mereka yang melontarkan isu provokasi bersumber akun-akun palsu di *facebook*. berdasarkan data Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia (APJII), pada tahun 2017, penggunaan internet di Indonesia sudah mencapai 50 persen dari jumlah penduduk di Indonesia, atau tepatnya berjumlah 143,26 juta jiwa. Tidak heran jika hasil Survei Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) tahun 2017 menyebutkan bahwa 92,40 persen saluran penyebaran berita bohong dilakukan menggunakan media sosial, dengan 91,8 persennya adalah jenis hoax yang berhubungan dengan sosial politik.⁷ Tujuan dari berita Hoax atau berita bohong

1. Berita Hoax bertujuan untuk melakukan provokasi massa untuk kepentingan politik tertentu
2. Memecah belah masyarakat dan bangsa untuk tidak percaya pada sistem politik yang berjalan
3. Membangkitkan isu SARA yang bertujuan mengembangkan opini
4. Membentuk polarisasi pada masyarakat
5. Tujuan ekonomi yang mengarah pada penipuan
6. Penguatan politik identitas.

⁶Arya Fernandes, *Politik Identitas dalam Pemilu 2019:Proyeksi dan Efektivitas* (Jakarta, CSIS ELECTION, 2018) hal 4-10

⁷<https://www.liputan6.com/news/read/3928845/bamsoet-hoax-dan-ujaran-kebencian-teror-demokrasi-indonesia>

Demokrasi dengan sistem informasi keablasan menyebabkan masyarakat bingung untuk membedakan mana informasi benar dan salah. Dampak yang lebih luas mengarah pada menciptakan interpretasi buruk dan menimbulkan disintegrasi di masyarakat. Jika persoalan ini dibiarkan maka masyarakat akan terarah untuk tidak percaya pada sistem pemilu atau bahkan ketidakpercayaan pada pemerintah. Tidak di napikan bahwa dapat terjadi kekacauan, anarkisme dan agitasi. Meskipun dalam Pasal 69 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 telah menyebutkan dengan jelas larangan dalam kampanye seperti menghasut, memfitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan dan atau kelompok masyarakat. Regulasi belum menjadikan kelompok pembuat hoax takut dan khawatir, karena setiap informasi mereka kemas dengan baik seolah tidak terjadi suatu rekayasa informasi.⁸

Pemerintah akan lebih rentang untuk mendapat masalah justru oleh berita bohong atau tidak benar. Pemerintah justru akan kehabisan waktu hanya untuk melakukan verifikasi atas semua berita tidak benar. Oleh karena itu ada beberapa langkah yang perlu diambil dalam mengurangi berita hoax,

- a. Meningkatkan peran lembaga pendidikan seperti sekolah dan universitas. Peningkatan pendidikan membentuk masyarakat yang semakin cerdas dan kritis terhadap

pemberitaan tidak benar. Pengembangan ilmu pengetahuan merupakan senjata utama untuk generasi muda agar lebih bijak dalam melakukan filterisasi informasi yang beredar di masyarakat.

- b. Literasi informasi untuk mendidik masyarakat agar selektif dan cerdas dalam menerima maupun menyebarkan informasi.
- c. Pembinaan keluarga, suka atau tidak suka pengawasan keluarga terhadap penggunaan teknologi cukup efektif mengingat pengguna media sosial lebih banyak pada usia sekolah baik SD maupun perguruan tinggi
- d. Penegakan hukum dan sosialisasi hukum, penegakan hukum terus digalakkan pemerintah namun memang sulit untuk mengatasi banyak akun-akun palsu terus bertambah. Di sisi lain perlu regulasi yang menimbulkan efek jera.
- e. Pembatasan media sosial, hal ini bisa dilakukan pemerintah jika dianggap perlu. Namun hal terus menuai *pro* dan *contra* oleh karena fungsi media sosial juga mempunyai dampak positif bagi sebagian orang misal untuk berdagang.

Upaya pencegahan hoax tentu harus dibarengi dengan kesadaran para elit politik untuk tidak mengambil kesempatan dengan berita yang mungkin saja menguntungkan kelompoknya atau kubunya. Elit politik berfungsi sebagai aktor berada pada garda terdepan sebagai pengontrol dan memberikan pendidikan politik pada masyarakat.

Maraknya berita hoax juga tidak terlepas dari penguatan politik identitas.⁹

⁸Tri Legionosukodan Setyo Harnowo, *Dynamics Fake News Or Hoax As A Source Of Horizontal Conflict In The Provincial Poverty Of Dki Jakarta 2017* (Jakarta, Jurnal Prodi Damai dan Resolusi Konflik, 2017) hal 111-116

⁹Secara sederhana politik identitas dapat dipahami sebagai suatu tindakan untuk

Politik Identitas semakin menguat pada masa pasca orde baru. Kehadiran politik identitas adalah antitesis dari kekuatan politik yang sentralistis dan hegemonik selama Orde Baru berkuasa.¹⁰ Namun pada era demokrasi dengan sistem pemilihan langsung politik identitas sebagai alat yang paling mudah digunakan dalam mempremis isu atau mobilisasi massa. Dalam hal ini politik identitas membawa sentimen negatif terhadap proses pemilu yang terjadi di Indonesia, atau terdapat kelompok yang mencari perlindungan pada kelompok agama maupun etnistas.¹¹ Kondisi ini cepat atau lambat akan membahayakan posisi pemerintah dalam bangunan relasi vertikalnya tetapi juga rawan, rentan, penuh resiko dan sangat berbahaya dalam relasi horizontalnya.¹²

Fenomena politik Identitas berbasis agama sangat kental pada rana politik nasional maupun lokal utamanya jika calon bersumber dari 2 agama yang berbeda seperti DKI Jakarta. Ini dibuktikan pada pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 memperlihatkan hasil survey Polmark Indonesia yang dipimpin oleh Eep Saifulah Fatah yang memberikan penjelasan bahwa sebesar 67,7 % pemilih Jakarta menyetujui memilih pemimpin Muslim. Hal ini bisa saja terjadi oleh karena Ahok pada saat itu merupakan tokoh di luar Muslim

yang kemudian terbukti melakukan penistaan agama (merujuk pada Putusan Pengadilan). Namun yang menjadi pertanyaan besar mengapa isu politik identitas berbasis agama muncul juga pada saat Pilpres 2019 yang nota bennya kedua pasangan calon berasal dari agama yang sama. Dugaan awal sama dengan yang disebut oleh Pierre yang melihat identitas dapat dijadikan sebagai alat mobilisasi.¹³

Pada umumnya, politik identitas terkait dengan upaya-upaya mulai sekedar penyaluran aspirasi untuk mempengaruhi kebijakan, penguasaan atas distribusi nilai-nilai yang dipandang berharga hingga tuntutan yang paling fundamental, yaitu penentuan nasib sendiri atas asas keprimordialan. Tidak menutup kemungkinan politik menuntut akan adanya kebijakan dengan memasukkan kepentingan kelompok tertentu tanpa harus melihat kelompok-kelompok lainnya. Kepentingan ini bisa saja mengarah pada perubahan fundamental atau perubahan dasar dari negara. Muncul berbagai bentuk politik Identitas justru akan mengarah pada terbentuknya kelompok-kelompok anti Pancasila, Anti pluralisme, dan anti demokrasi. Dalam hal Geertz melihat bahwa adanya ancaman disitegrasi bangsa dari politisasi agama.¹⁴

mementingkan kelompok sendiri diatas kelompok lain.

¹⁰Budiman Sudjatmiko, *Politik Aliran dalam Pancasila: Keniscayaan Sejarah dan Antitesis Fundamentalisme* (Jakarta, Democracy Projeck, 2012). Hal 73-80

¹¹Henk S Nordholt, dalam Muhtar Haboddin, *Menguatnya politik Identitas di Ranah Lokal* (Malang, Jurnal Studi Pemerintahan Vol.3 No.1, 2012,) hal 117-130

¹²*ibid*

¹³Endang Sari, *Kebangkitan Politik Identitas Islam Pada Arena Pemilihan Gubernur Jakarta* (Makassar, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, 2016) hal 145-153

¹⁴Siti Faridah, Jerico Mathias, *Politisasi Agama Pemecah Keutuhan Bangsa dalam Pemilu*, (Semarang, Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Volume 4 Nomor 3, 2018) hal 490-500

Perdebatan masalah relasi agama dan negara sudah pernah terjadi pada awal kemerdekaan dimana Soekarno dan Natsir berdebat tentang masuk tidaknya agama sebagai dasar negara. Soekarno melihat bahwa agama dan negara merupakan dua unsur yang harus dipisahkan. Agama selalu terkait dengan masalah ritual hubungan dengan Tuhan. Sedangkan pandangan Natsir yang mewakili kelompok nasionalis Islami mengarah terciptanya hubungan atau relasi antara agama dan negara. Menurutnya agama dan negara adalah dua etas yang tidak dapat dipisahkan sebab agama tidak hanya bicara hubungan dengan Tuhan tetapi juga hubungan dengan sesama manusia dalam sebuah negara. Namun pada akhir perdebatan ini mengalami konsensus dengan lahir sebuah konsep yang diterima bersama untuk semua kalangan yang disebut Pancasila.

Mengacu pada sejarah Pancasila, dapat mengambil makna bahwa masalah politik identitas yang kemudian bermuara pada perubahan dasar negara harusnya tidak lagi jadi perdebatan. Pancasila merupakan simbol pemersatu bangsa yang sekira terbentuk dari unsur keTuhanan, budaya dan kultur masyarakat Indonesia. Pancasila hadir untuk menjamin hak-hak setiap manusia di dalamnya diperlakukan sama dan setara yang juga tertuang dalam UUD 1945. Maka dari itu Pancasila harus mampu menjadi ideologi terbuka ideologi yang dapat menjawab tantangan masa kini. Tokoh politik, tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat harus memandang Pancasila sebagai *common interest* yang sekira menjadi alat pemersatu bangsa.

Tantangan Pancasila tentu akan terus mengalami dinamika dari dalam negeri sendiri sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Sekarang tugas masyarakat dan terlebih khusus pada tenaga pendidik dari tingkat SD hingga perguruan tinggi termaksud sekolah berbasis agama harus mampu memateraikan Pancasila dalam akal dan sanubari. Permasalahan yang ditemukan bahwa sekolah hanyalah menjadikan Pancasila sebagai hafalan tanpa memberikan gambaran makna dan bagaimana Pancasila di implemenmentasikan.¹⁵ Anak sekolah maupun mahasiswa hanya melihat pendidikan Pancasila sebagai suatu mata pelajaran/kuliah yang pada akhir hanya kompetisi mencari nilai. Padahal Pancasila punya makna yang lebih luas dari sekedar nilai mata pelajaran yakni makna pemersatu dan kandungan cita-cita negara.

2. KESIMPULAN

Pancasila merupakan dasar negara yang lahir dari konsensus para *Founding Fathers* bangsa ini. Pancasila kemudian dijadikan sebagai dasar negara dan ideologi negara. Namun Pancasila terus mengalami tantangan dan rorongan dalam berbagai isu, mulai dari adanya gerakan mengganti dasar negara menjadi dasar negara agama, perkembangan hoax (berita bohong) hingga mengarah pada politik identitas berbasis agama. Meskipun demikian Pancasila adalah

¹⁵Natal Kristiono, *Penguatan Ideologi Pancasila Di Kalangan Mahasiswa Universitas Negeri Semarang*(Semarang, HARMONY VOL.2 NO. 2,) hal 194-200

ideologi pemersatu dimana hak-hak tiap manusia sama di hadapan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Faridah Siti, Jerico Mathias. *Politisasi Agama Pemecah Keutuhan Bangsa dalam Pemilu.* (Semarang, Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Volume 4 Nomor 3, 2018).
- Fernandes. Arya. *Politik Identitas dalam Pemilu 2019: Proyeksi dan Efektivitas* (Jakarta, CSIS ELECTION, 2018).
- Haboddin Muchtar. *Menguatnya politik Identitas di Ranah Lokal* (Malang, Jurnal Studi Pemerintahan Vol.3 No.1, 2012).
- Kristiono. Natal, *Penguatan Ideologi Pancasila Di Kalangan Mahasiswa Universitas Negeri Semarang* (Semarang, HARMONY VOL.2 NO. 2).
- Legionosuko, Try dan Setyo Harnowo. *Dynamics Fake News Or Hoax As A Source Of Horizontal Conflict In The Provincial Poverty Of Dki Jakarta 2017* (Jakarta, Jurnal Prodi Damai dan Resolusi Konflik, 2017).
- Mu'id Aris Shofa. *Memaknai Kembali Multikulturalisme Indonesia Dalam Bingkai Pancasila* (Malang, Jurnal Pancasila dan , Kewarganegaraan, Vol. 1, No. 1, Juli 2016 ISSN 2527-7057, 2016).
- Ristina, *Pancasila dan Berbagai Permasalahan Aktual* (Jawa Tengah, Seminar Nasional Hukum Volume 2 Nomor 1 Tahun 2016).
- Santoso, A. L. *Sejarah Terlengkap Gerakan Separatis Islam.* (Yogyakarta: Palapa, 2014).
- Sari. Endang. *Kebangkitan Politik Identitas Islam Pada Arena Pemilihan Gubernur Jakarta* (Makassar, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, 2016).
- Singka Subekti. Valina, *Menyusun Konstitusi Transisi,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008).
- Sudjatmiko. Budiman. *Politik Aliran dalam Pancasila: Keniscayaan Sejarah dan Antitesis Fundamentalisme* (Jakarta, Democracy Projeck, 2012).
- Ulya, *Pancasila Simbol Harmonisasi Antar Umat Beragama di Indonesia,* (Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan issn 2354-6147 eissn 2476-9649, 2016).